

A. Buku

- Afandi, Ali, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ariesto Hadi, Sutopo, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Anshary MK, H.M., 2013, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Fockema Andreae, S.J., *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, diterjemahkan oleh Wakter Siregar, Bij J.B. Wolters uitgeversmaatschappij, (N.V. Groningen, Jakarta, 1951.
- Hadi Sutopo, Ariesto, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hanitijo, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- M. Situmorang, Victor dan Sitanggang, Cormentyna, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyoto, 2011, *Perjanjian Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Pitlo, A, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemahan M. Isa Arif, PT. Intermasa, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Subekti R. dan Tjitrosoedibio R., 1982, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4379)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganeraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5419)



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM AKTA KEMATIAN YANG BERBEDA NAMA DENGAN AKTA KELAHIRAN YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERALIHAN HAK WARIS

EMY WAHYUNINGTYAS, Ninik Darmi, S.H., M. Hum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 457)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32)

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254)

C. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Internet

[websiteayu.com/akibat-hukum-secara-perdata-anak-yang-lahir-luar-kawin-pasca-putusan MK](http://websiteayu.com/akibat-hukum-secara-perdata-anak-yang-lahir-luar-kawin-pasca-putusan-MK)

<https://kusanantokarasan.com/2014/03/27/4-langkah-proses-turun-waris-di-kelurahan/>



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM AKTA KEMATIAN YANG BERBEDA NAMA DENGAN
AKTA KELAHIRAN YANG
DIKELUARKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA**

YOGYAKARTA DALAM PERALIHAN HAK WARIS
EMY WAHYUNINGTYAS, Ninik Darmini, S.H, M. Hum

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

<http://www.karawangkab.go.id/sites/default/files/form-dokument/>

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/1807/1356>

<http://dukcapil.slemankab.go.id/profile/struktur-organisasi>